

NOTA KESEPAHAMAN

Antara

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Dengan

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Nomor : 2 TAHUN 2019

Nomor : 02/PKS/M/2019

Sepakat mengadakan kerja sama di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang meliputi:

1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Sosialisasi dan penyebarluasan kegiatan melalui media publikasi serta seminar, konferensi, simposium, atau lokakarya;
3. Konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
4. Penyediaan, pemanfaatan serta pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing;
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara pejabat setingkat eselon I atau eselon II di lingkungan kerja **PARA PIHAK**.

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Jakarta, pada tanggal Lima Belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas (15 – 02 – 2019).

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,
KEPALA**

t.t.d

RONI DWI SUSANTO

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,
MENTERI**

t.t.d

M. BASUKI HADIMULJONO